

Siapakah Kita Menghadapi Risiko Bencana?

Modul

Pengurangan Risiko Bencana Inklusif
Melalui Pendekatan Hak Asasi Manusia

Funded by



elrha



START
NETWORK



Siapakah Kita Menghadapi Risiko Bencana?

Modul
Pengurangan Risiko Bencana Inklusif
Melalui Pendekatan Hak Asasi Manusia

Funded by



elrha



START
NETWORK





elrha



START
NETWORK



Siapakah Kita Menghadapi Risiko Bencana? Modul Pengurangan Risiko Bencana Inklusif Melalui Pendekatan Hak Asasi Manusia

Hak Cipta YAKKUM Emergency Unit © Maret 2023
Jln. Kaliurang KM 12, Dsn Candi 3 No. 34 Yogyakarta 55581 - Indonesia
Telepon: +62-274-882477 | www.yeu.or.id

Penulis: Ida Putri, Inclusion Advisor IDEAKSI
Penyunting: YAKKUM Emergency Unit
Tata letak: Nur Adilah Luthfiyatur Rohmah

Tentang CLIP IDEAKSI

Community-Led Innovation Partnership (CLIP) atau Kemitraan untuk Inovasi Berbasis Komunitas mendukung munculnya solusi-solusi yang kembangkan secara lokal untuk masalah-masalah kemanusiaan di Republik Demokratik Kongo (ditangguhkan), Guatemala, Indonesia, dan Filipina. YAKKUM Emergency Unit (YEU) menjalankan program IDEAKSI (akronim dari Ide, Inovasi, Aksi, dan Inklusi) sebagai proyek CLIP di Indonesia. Sebagai bagian dari kemitraan tersebut, IDEAKSI berusaha mencari solusi-solusi inovatif dan inklusif untuk penanggulangan bencana bagi kelompok paling berisiko, termasuk difabel dan lansia.

Melalui dukungan dari Elrha, Start Network, the Asia Disaster Reduction and Response Network (ADRRN) Tokyo Innovation Hub, dan pendanaan dari the UK Foreign, Commonwealth, and Development Office (FCDO), YEU dapat mengadakan IDEAKSI sebagai proyek CLIP di Indonesia.

Daftar Isi

Glosarium	7
Pengantar	10
Bagian A: Pendahuluan	14
Tentang Modul Ini	14
Istilah yang Digunakan	14
Penyandang Disabilitas	14
Orang Lanjut Usia	15
Bencana	16
Hak Asasi Manusia	17
Inklusif	17
Bagaimana Menggunakan Modul Ini?	18
Cakupan	18
Bagian B: Memahami Inklusi Disabilitas dan Orang Lanjut Usia	19
Konsep Disabilitas	19
Ragam Disabilitas	22
Washington Group Short Set of Disability Questions (WGQ)	23
Disabilitas, Orang Lanjut Usia, dan Inklusi	25
Bagian C: Prinsip HAM dalam Mewujudkan Inklusi	29
Hak-hak Dasar dalam DUHAM	30
Isu Disabilitas Adalah Isu HAM	32
Pemenuhan Berdasarkan Hak	34
Bagian D: Akomodasi dan Adaptasi yang Dibutuhkan dalam Pengurangan Risiko Bencana yang Inklusif	38
Empat Prinsip Inklusi	39
Kesadaran	39
Pelibatan	40

Aksesibilitas	41
Desain universal	41
Akomodasi yang layak	42
Dukungan	42
Bagian E: Mendorong Program yang Inklusif	43
Langkah 1: Identifikasi dan pendataan	
Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia	43
Langkah 2: Meningkatkan kapasitas	50
Langkah 3: Partisipasi Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia	52
Langkah 4: Membangun rasa kepemilikan terhadap program	58
Daftar Pustaka	64
Praktik-praktik Baik di Lapangan	66
Membuat Program Penanggulangan Bencana	
Bukan Membuat Program Baru	67
Bencana Masih Jauh, Benarkah?	69
Memberdayakan Orang Lanjut Usia dalam Sistem Pertanian Modern	71
Mengoptimalkan Peran Kader Perempuan dalam Pendataan Disabilitas di Desa	74
Tanggap Darurat Banjir yang Sensitif terhadap Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan	77
Lembar Penilaian Mandiri	80
Lembar 1: Penilaian individu pelaksana program	80
Lembar 2: Penilaian program	84
Lembar 3: Penilaian organisasi	87
Evaluasi dari Pengguna	90
Lembar Tanggapan	91

Glosarium

Basarnas	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
CLIP	Community-Led Innovation Partnership (Kemitraan untuk Inovasi Berbasis Masyarakat/Komunitas)
CRPD	Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities)
Damkar	Pemadam kebakaran
DUHAM	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights)
HAM	Hak asasi manusia
KDD	Kelompok Disabilitas Desa
IDEAKSI	Ide Inovasi Aksi Inklusi
Lansia	Orang Lanjut Usia
OPD	Organisasi Penyandang Disabilitas
PB	Penanggulangan bencana (disaster management/DM)
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations/UN)

PKK	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
PMI	Palang Merah Indonesia
PP	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
PRB	Pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction/DRR)
ULD	Unit Layanan Disabilitas
UNDRR	Badan PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (United Nations Office for Disaster Risk Reduction)
UU	Undang-Undang Republik Indonesia
WGQ	Kumpulan pertanyaan singkat Washington Group (Washington Group Short Set of Disability Questions)
WHO	Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization)
YAKKUM	Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum
YEU	YAKKUM Emergency Unit

Tentang para mitra

Elrha adalah badan amal global yang mencari solusi untuk masalah kemanusiaan yang kompleks. Visinya adalah dunia yang memiliki kemampuan untuk mengurangi dampak krisis kemanusiaan. Badan ini adalah aktor mapan dalam komunitas kemanusiaan yang bekerja dalam kemitraan bersama organisasi kemanusiaan, peneliti, inovator, dan sektor swasta untuk mengatasi sejumlah tantangan tersulit yang dihadapi orang di seluruh dunia.

Start Network adalah jaringan global lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang terdiri dari lebih dari 50 lembaga bantuan nasional dan internasional dari lima benua. Misinya adalah menciptakan era baru aksi kemanusiaan yang akan menyelamatkan lebih banyak nyawa melalui inovasi, pendanaan cepat, aksi dini, dan pelokalan.

Asian Disaster Reduction and Response Network (ADRRN) adalah jaringan organisasi masyarakat sipil nasional di seluruh kawasan Asia-Pasifik. Sejak tahun 2002, ADRRN telah berkembang pesat dari jaringan yang berfokus pada kesadaran menjadi suara regional dalam isu-isu advokasi dan juga pengembangan kapasitas. Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan koordinasi, berbagi informasi dan kolaborasi di antara organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat pengurangan dan respons krisis yang efektif dan efisien di kawasan Asia-Pasifik.

YAKKUM Emergency Unit (YEU) merupakan salah satu unit kerja YAKKUM (Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum) dengan mandat utama melakukan tanggap darurat bencana dan inisiatif kesiapsiagaan komunitas. YEU memiliki pengalaman pelayanan kemanusiaan sejak tahun 2001 dan memberikan dampingan kepada lebih dari 300 desa, serta bermitra dengan para pihak, termasuk aktor-aktor penanggulangan bencana, pemerintahan setempat dan organisasi berbasis komunitas, baik di Indonesia maupun luar negeri. YEU bekerja berdasarkan prinsip netralitas dan imparsiial sehingga tidak memandang ras, agama, atau kelompok, dan mengutamakan kepentingan kemanusiaan untuk penanggulangan bencana yang inklusif.

Pengantar



Bagi Sumarno, masa di mana pandemik Covid-19 berlangsung menjadi salah satu masa paling buruk dalam hidupnya. Bagaimana tidak, setelah berhasil membangun kembali kehidupan setelah menjadi Penyandang Disabilitas, apa yang sudah ada dalam genggamannya terancam hilang.

Sumarno menjadi Penyandang Disabilitas fisik dan menjadi pengguna kursi roda akibat kecelakaan kerja yang terjadi beberapa tahun lalu. Setelah sempat kehilangan pekerjaan di perusahaan, dia berhasil bangkit lagi dan menjadi pengusaha persewaan sound system sekaligus dokumentasi pesta. Usaha ini mengantarkannya memiliki perekonomian baik dan mampu mempekerjakan beberapa karyawan.

Namun pada saat pandemik lalu, usahanya terancam gulung tikar karena tidak ada lagi yang menyelenggarakan pesta.



Akibatnya, dia harus merumahkan karyawan-karyawannya, dan menjual beberapa aset usaha untuk bisa bertahan. Yang lebih buruk lagi adalah saat dia tertular penyakit ini, dengan kondisi tubuhnya, dampak virus menjadi lebih buruk dirasakannya. Dan saat itu dia terpaksa sendirian menanggung sakit.

Terbiasa beraktivitas dengan dibantu orang lain sebagai personal assistant, hari-hari saat isolasi menjadi lebih berat dijalani. Tidak pernah ada hal yang mempersiapkannya menghadapi ancaman penyakit seperti ini, ataupun bagaimana mempersiapkan orang-orang di sekelilingnya untuk membantu ketika sakit."

Cerita di atas merupakan satu dari cerita Penyandang Disabilitas yang terseok-seok bertahan saat bencana pandemik berlangsung. Selain mengalami dampak berupa penurunan mata pencaharian, ia juga sakit dan menjalani isolasi dengan pendampingan yang minim. Hal ini disebabkan masih minimnya pelibatan Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana. Tidak ada yang mempersiapkan Penyandang Disabilitas maupun orang-orang di sekitarnya dalam menghadapi kondisi darurat yang bisa berlangsung kapan saja.

Oleh karena itu, modul ini disusun untuk secara sederhana memandu bagaimana mewujudkan penanggulangan bencana

yang inklusif. Bencana bisa terjadi kapan saja dan pada siapa saja. Oleh karena itu, upaya penanggulangan bencana dengan melibatkan setiap orang tanpa kecuali perlu dibangun dari sekarang.

Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia menjadi salah satu kelompok yang memiliki tingkat kerentanan tinggi dalam bencana, baik karena ke-Disabilitasnya maupun karena belum terpenuhi hak-haknya. Hak penyandang disabilitas atas perlindungan dari bencana merupakan amanat Pasal 20 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan PP Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.

Lebih lanjut dalam PP Nomor 42 Tahun 2020, perlindungan risiko bencana bagi penyandang disabilitas harus memperhatikan aspek partisipasi penyandang disabilitas baik dalam kegiatan sosialisasi, simulasi, evakuasi, dan penanganan korban bencana. Untuk itu, pendekatan Hak Asasi Manusia perlu dibangun dalam mendorong penanggulangan bencana inklusif.

Pada akhirnya, dalam upaya membentuk masyarakat tangguh bencana, Penyandang Disabilitas dan orang dengan lanjut usia bukan lagi berperan sebagai objek, tetapi sebagai subjek aktif yang mampu memberikan kontribusi optimal dalam meminimalkan dampaknya.

Yogyakarta, 2 Oktober 2022
Penyusun



Bagian A: Pendahuluan

Tentang Modul Ini

Modul ini merupakan panduan bagi organisasi, institusi publik, pemerintah dan para pihak yang ingin belajar secara mandiri mengenai prinsip-prinsip inklusi dalam penanggulangan bencana. Bagian-bagian dalam modul ini dibuat dengan mengedepankan prinsip-prinsip HAM dalam mewujudkan inklusivitas di bidang penanggulangan bencana.

Istilah yang Digunakan

Penyandang Disabilitas



Sejak tahun 2010, sejumlah organisasi masyarakat dan para pakar sudah mencurahkan pendapat terkait perubahan istilah penyandang cacat menjadi istilah yang lebih humanis, berbasis HAM, dan berperspektif sosial. Perubahan terminologi ini cukup penting mengingat istilah dapat mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap subjek.

Pada tahun 2016, lahirlah UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menggunakan istilah Penyandang Disabilitas untuk mengganti istilah Penyandang Cacat. Undang-Undang tersebut mendefinisikan Penyandang Disabilitas sebagai orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi

secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Istilah Penyandang Disabilitas digunakan dengan memperhatikan prinsip penghormatan HAM penyandang disabilitas dan kaidah bahasa. Selain itu, istilah ini juga sesuai dengan istilah yang digunakan dalam Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (CRPD—Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

Inilah yang melatarbelakangi penggunaan istilah Penyandang Disabilitas dalam modul ini, dengan tetap menghormati istilah lain seperti Difabel yang digunakan oleh pemerintah, komunitas dan masyarakat.

Orang Lanjut Usia



Dalam UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, orang dikategorikan lanjut usia setelah mencapai 60 tahun atau lebih.

Menurut WHO, penuaan memberikan tantangan sekaligus kesempatan. Tantangan itu berupa meningkatnya kebutuhan akan layanan kesehatan primer dan layanan jangka panjang, kebutuhan tenaga yang lebih besar dan berpengalaman, kebutuhan yang lebih intensif terhadap lingkungan fisik dan sosial yang dibuat ramah untuk orang lanjut usia, juga mengajak semua sektor untuk melawan *ageism*.

Adapun kesempatan merujuk pada penanganan yang baik demi memungkinkan orang lanjut usia untuk berkontribusi, baik dalam keluarga maupun komunitas lokal (misalnya sebagai relawan, ataupun tenaga kerja baik di sektor formal maupun non-formal), dan bahkan bagi masyarakat luas.

Ageism atau diskriminasi usia adalah bentuk stereotip dan diskriminasi terhadap individu karena usia. Diskriminasi usia merupakan satu set kepercayaan, sikap, norma, dan nilai-nilai yang dipakai untuk membenarkan prasangka dan aksi diskriminasi.

Bencana



Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang

disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana menurut UNDRR didefinisikan sebagai suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan dan melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri.

Hak Asasi Manusia



UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak Asasi Manusia tidak dapat disangkal dan dihilangkan keberadaannya. Hak Asasi Manusia juga tidak dapat dipisah-pisahkan atau dikategorikan berdasarkan kepentingannya.

Penyandang Disabilitas juga manusia yang memiliki hak asasi sama seperti manusia pada umumnya yang tidak memiliki ke-Disabilitasan. Untuk itu, HAM penyandang disabilitas juga tidak dapat disangkal dan dihilangkan keberadaannya.

Inklusif

Secara harfiah, inklusif (kata sifat) atau inklusi (kata benda) diartikan sebagai usaha untuk mengikutsertakan, terbuka, ataupun menerima perbedaan dan keragaman yang ada.



Bagaimana Menggunakan Modul Ini?

Bagian-bagian pada modul ini disusun untuk lebih memahami bagaimana membangun kerja-kerja penanggulangan bencana yang inklusif dengan mengedepankan pelibatan semua elemen masyarakat, termasuk di dalamnya orang lanjut usia,

Penyandang Disabilitas, dan kelompok rentan. Siapapun yang akan menggunakan modul ini, diharapkan untuk dapat membaca dan memahami seluruh bagian yang tertera dalam modul, agar dapat menjadi panduan berbagai pihak dalam kerja-kerja pengurangan risiko bencana yang efektif, komprehensif, dan holistik.

Cakupan

Secara garis besar, modul ini disusun meliputi empat hal yaitu:

- 01 Memahami Inklusi Disabilitas
- 02 Prinsip HAM dalam Mewujudkan Inklusi
- 03 Akomodasi dan Adaptasi yang Dibutuhkan dalam Penanggulangan Bencana yang Inklusif
- 04 Panduan Asesmen bagi Pengguna Modul

Modul ini merupakan panduan bagi perwujudan penanggulangan bencana yang inklusif terhadap Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia. Aspek lain terhadap dimensi keberagaman di luar Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia tidak banyak diulas di modul ini, meskipun beberapa aspek seperti kelompok rentan dan gender mungkin akan beririsan berkaitan dengan aspek HAM.

Bagian B: Memahami Inklusi Disabilitas dan Orang Lanjut Usia



Foto: Penyediaan layanan kebencanaan ramah Disabilitas dimulai dengan peningkatan kesadaran pemangku kepentingan_Dok. CIQAL

Konsep Disabilitas

Disabilitas merupakan bagian dari kehidupan manusia. Hampir setiap orang, permanen atau pada masa tertentu, atau bahkan ketika menjadi tua akan mengalami fase hidup sebagai Disabilitas. Oleh karena itu, kajian mengenai Disabilitas berkembang secara dinamis, kompleks, bersifat interseksional dan mencakup multidimensional aspek kehidupan manusia.

UU Nomor 8 Tahun 2016 mendefinisikan Disabilitas muncul akibat hambatan individu dalam kaitannya ketika berinteraksi dengan lingkungan, yang menghalangi untuk bisa berpartisipasi secara penuh dan efektif. Ini bisa diartikan bahwa Disabilitas tidak dilekatkan pada individunya, sehingga partisipasi Penyandang Disabilitas bisa ditingkatkan dengan menghilangkan hambatan individu dan lingkungan.

Apakah Anda tahu?



Ilustrasi: Disability_Image by Freepik

Hambatan merujuk pada rintangan fisik ataupun yang tidak terlihat yang menghalangi Penyandang Disabilitas dalam mengakses atau berpartisipasi penuh dalam dalam kegiatan sehari-hari. Hambatan dikategorikan dalam empat jenis, yaitu:

01 **Hambatan fisik**

Mengacu pada hambatan yang terkait akses pada bangunan dan lingkungan fisik.

02 **Hambatan komunikasi**

Meliputi cara dan media komunikasi yang digunakan, misalnya bahasa lisan menjadi hambatan bagi Tuli, brosur yang berisi banyak gambar visual menjadi hambatan bagi Disabilitas netra, informasi yang disampaikan dengan kalimat rumit menjadi hambatan bagi Disabilitas intelektual.

03 **Hambatan sosial dan budaya**

Termasuk di dalamnya perilaku negatif seperti prasangka, rasa kasihan, overprotective, dan stigma.

04 **Hambatan institusional**

Mengacu pada kebijakan, legislasi, dan faktor institusi yang tidak memberikan dukungan bagi hak semua orang di satu masyarakat.

Dalam upaya memastikan Penyandang Disabilitas menikmati hak-haknya, penting untuk memperhatikan beberapa hal berikut:



Lingkungan – faktor lingkungan memberikan dampak yang besar bagi Penyandang Disabilitas. Lingkungan yang tidak aksesibel menjadikan seseorang menjadi Disabilitas karena tidak bisa berpartisipasi dan menghambat inklusi. Lingkungan bisa diubah dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi kesehatan, menghindari kondisi Disabilitas semakin parah, dan meningkatkan kualitas hidup Penyandang Disabilitas. Perubahan lingkungan bisa dilaksanakan melalui proses legislasi, perubahan kebijakan, peningkatan kapasitas, ataupun pengembangan teknologi.



Pengetahuan dan Sikap – pengetahuan dan sikap berkorelasi langsung dengan penyediaan layanan dan kehidupan sosial. Peningkatan kesadaran dan mengubah sikap negatif kerap kali menjadi langkah awal dalam menciptakan lingkungan yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas. Pada umumnya, Disabilitas erat kaitannya dengan pengetahuan lingkungan yang tidak memadai.



Stigma dan Diskriminasi – cara pandang yang bersifat negatif yang masih diyakini oleh sebagian besar masyarakat mengenai Disabilitas menjadi masalah besar yang menjauhkan Penyandang Disabilitas untuk bisa berpartisipasi dan terlibat aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

UU Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan diskriminasi adalah pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar Disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

Ragam Disabilitas

Dalam UU Nomor 8 Tahun 2016, ragam Disabilitas dikategorikan menjadi lima, yaitu:

01



Disabilitas fisik: yaitu terganggunya fungsi gerak, yang masuk dalam kategori ini antara lain : amputasi, lumpuh layu, kaku, paraplegia

02



Disabilitas intelektual: yaitu kekurangan secara intelektual dan keterbelakangan secara mental, yang masuk dalam kategori ini antara lain: lambat belajar dan gangguan otak

03



Disabilitas mental: yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku, yang masuk dalam kategori ini antara lain: depresi, gangguan kepribadian, autisme, dan hiperaktif

04



Disabilitas sensoris: yaitu terganggunya salah satu fungsi dari pancaindra, yang masuk dalam kategori ini antara lain: Disabilitas netra, rungu, atau wicara

05



Disabilitas ganda: memiliki dua atau lebih ragam Disabilitas, yang masuk dalam kategori ini antara lain: Disabilitas tuli-wicara dan Disabilitas netra-tuli

Washington Group Short Set of Disability Questions (WGQ)

Dewasa ini, WGQ atau pertanyaan singkat kelompok Washington dikembangkan untuk mengidentifikasi ragam Disabilitas. WGQ terdiri dari enam pertanyaan yang dirancang untuk mengidentifikasi orang dengan hambatan fungsional. Set pertanyaan WGQ dapat dengan cepat dan mudah digunakan dalam berbagai kondisi untuk menghasilkan data pilah Disabilitas.

Enam pertanyaan pokok Grup Washington adalah:

-  01 Apakah Anda mengalami kesulitan melihat, meskipun memakai kacamata?
-  02 Apakah Anda mengalami kesulitan mendengar, meskipun menggunakan alat bantu dengar?
-  03 Apakah Anda mengalami kesulitan berjalan dan naik turun tangga?
-  04 Apakah Anda mengalami kesulitan mengingat atau berkonsentrasi?
-  05 Apakah Anda mengalami kesulitan dengan perawatan diri seperti membersihkan seluruh tubuh atau berpakaian?
-  06 Dengan bahasa (daerah) yang Anda gunakan, apakah Anda mengalami kesulitan berkomunikasi, misalnya memahami atau dipahami orang lain?

Untuk setiap pertanyaan, ada empat pilihan jawaban, yaitu:

tidak kesulitan

banyak kesulitan

sedikit kesulitan

tidak bisa sama sekali

Apabila responden menjawab banyak kesulitan atau tidak bisa sama sekali pada satu atau lebih pertanyaan, maka responden diidentifikasi sebagai penyandang disabilitas.

Dalam kaitannya dengan pendataan Disabilitas, WGQ memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan penyebutan ragam Disabilitas. Hal ini dikarenakan masih ada orang enggan mengungkapkan hambatan fungsional dikarenakan tingkat pemahaman dan stigma. Namun di sisi lain, set pertanyaan WGQ masih belum mengakomodasi hambatan yang dialami oleh Disabilitas psikososial ataupun intelektual.

Dalam mendorong penanggulangan bencana inklusif, penggunaan WGQ berguna dalam:

- Membantu memahami kesulitan fungsi tubuh tanpa pelabelan atau kategorisasi Disabilitas
- Membantu memahami kesulitan fungsional, sehingga dapat berguna dalam mengidentifikasi kerentanan di berbagai situasi, seperti melakukan evakuasi, berpartisipasi aktif, mengakses informasi keselamatan, mengakses layanan dan fasilitas, dan mengidentifikasi orang dengan keterbatasan fungsional secara spesifik
- Membantu identifikasi terpilah dari kebutuhan dan kapasitas masing-masing orang dengan hambatan fungsional
- Membantu mengidentifikasi layanan dan fasilitas yang dibutuhkan orang dengan keterbatasan fungsional
- Membantu mengidentifikasi kegiatan dan program yang disesuaikan dengan keterbatasan fungsional yang dimiliki

Disabilitas, Orang Lanjut Usia, dan Inklusi



Foto: Ibu Ida, seorang perempuan dengan Disabilitas yang berdaya dan mengadvokasi inklusi_Dok. YEU/Dika

Generalisasi Penyandang Disabilitas atau orang lanjut usia tidak tepat digunakan karena mereka juga memiliki identitas lain yang beragam terkait usia, gender, status sosial ekonomi, latar belakang budaya dan etnis, dan lain-lain. Sehingga dalam memahami lebih lanjut mengenai inklusi, pemahaman mengenai konsep keberagaman ini perlu dibangun terlebih dulu.

Keberagaman meliputi empat dimensi identitas manusia, yaitu:

- 01 **Kepribadian**, misalnya sifat, kemampuan, Disabilitas
- 02 **Internal**, misalnya gender, ras, suku, usia, tingkat inteligensi, orientasi seksual
- 03 **Eksternal**, misalnya budaya, agama, kebangsaan
- 04 **Keorganisasian**, misalnya jabatan, divisi, berorganisasi/tidak berorganisasi

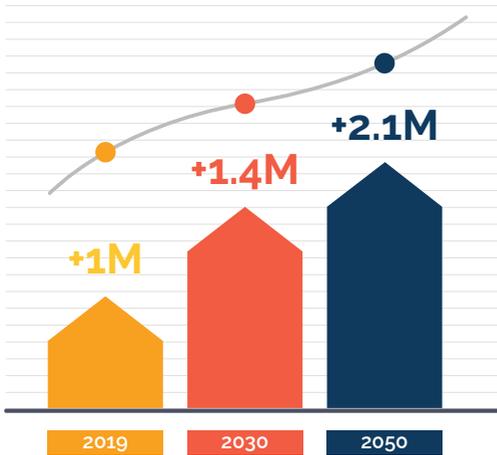
Dalam kaitannya dengan Penyandang Disabilitas dan orang

lanjut usia dengan kelompok marginal lainnya, semakin banyak identitas yang dimiliki berkorelasi dengan tingkat kerentanannya. Misalnya, seorang Perempuan Disabilitas memiliki dua identitas rentan, sebagai Penyandang Disabilitas dan bergender perempuan. Selain itu Disabilitas mental dan intelektual acapkali memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan Disabilitas fisik atau sensorik.

Inklusi bukan hanya tentang melibatkan ataupun mengintegrasikan, tapi lebih pada menjunjung tinggi hak, mengenali kebutuhan spesifik dan hambatan menuju inklusi, sekaligus mengambil tindakan dalam mengatasi permasalahan yang timbul. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, sebagai landasan baru dalam memandang Disabilitas sekaligus dalam mendorong terwujudnya inklusi Disabilitas, memiliki delapan prinsip sebagai berikut:

- 01 Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu; termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan
- 02 Non-diskriminasi
- 03 Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan (inklusif) dalam masyarakat
- 04 Penghormatan pada perbedaan dan penerimaan Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan
- 05 Kesetaraan kesempatan
- 06 Aksesibilitas
- 07 Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan
- 08 Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan pada hak Penyandang Disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka

Apakah Anda tahu?



Grafik: Peningkatan orang lanjut usia dalam 30 tahun ke depan_Dok. Adilah

WHO menyatakan bahwa jumlah dan proporsi orang lanjut usia semakin meningkat. Pada 2019 terdapat 1 milyar orang lanjut usia di dunia, yang diperkirakan meningkat menjadi 1,4 milyar pada 2030, dan 2,1 milyar pada 2050. Perkiraan peningkatan jumlah populasi lanjut usia akan berlangsung lebih cepat dalam beberapa dekade

mendatang, terutama di negara-negara berkembang.

WHO bekerja bersama negara-negara anggota, badan-badan PBB, dan pemangku kebijakan dari berbagai sektor untuk meningkatkan kesehatan orang lanjut usia. Peningkatan kesehatan orang lanjut usia dilakukan dengan meningkatkan dan menjaga kemampuan fungsional sehingga bisa hidup sejahtera di masa tua.

WHO melaksanakan kerja-kerja ini sesuai dengan Strategi dan Rencana Aksi Global Tentang Penuaan dan Kesehatan 2016-2020 dan terkait dengan Dekade Kesehatan Lansia PBB (2021-2030) yang fokus pada:

- Mengubah cara berpikir, merasakan dan bertindak terhadap usia dan penuaan
- Memastikan masyarakat meningkatkan kemampuan orang lanjut usia

- Membangun pelayanan kesehatan terpadu yang berpusat pada masyarakat dan pelayanan kesehatan primer yang responsif pada lansia
- Menyediakan akses terhadap layanan jangka panjang bagi orang lanjut usia yang membutuhkan

Apakah Anda tahu?



Grafik: Penduduk Indonesia yang hidup Disabilitas_Dok. Adilah

Di Indonesia, terdapat 8,26% atau 21,9 juta penduduk yang hidup dengan Disabilitas (Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020) dan membutuhkan setidaknya satu alat bantu seperti kursi roda, tongkat, atau alat bantu dengar. Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang memiliki jumlah penduduk Disabilitas paling banyak, yang disebabkan oleh penyakit dan kecelakaan (76%) dan faktor bawaan lahir (17%). Dengan tingginya kejadian bencana, lebih dari 300 kejadian dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, Indonesia menjadi wilayah yang memiliki potensi paling tinggi untuk berkontribusi pada jumlah penduduk Disabilitas.

Bagian C: Prinsip HAM dalam Mewujudkan Inklusi



Foto: Bekerja adalah hak dasar setiap individu_Dok. YEU

Secara legal, Hak Asasi Manusia merupakan konsep universal, yang secara global termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sejak 1948. Hak Asasi Manusia bagi setiap orang di Indonesia telah dijamin oleh negara. Secara tegas, Pancasila sebagai dasar pedoman negara maupun Undang-Undang Dasar 1945 menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Secara spesifik, CRPD adalah satu instrumen internasional yang sudah sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 yang menjamin Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas.

Dalam penerapannya, ada 3 prinsip utama dalam penyelenggaraan Hak Asasi Manusia yaitu:

- Kesetaraan dan non-diskriminasi
- Partisipasi dan pemberdayaan
- Transparansi dan akuntabilitas

Hak-hak Dasar dalam DUHAM

Dalam DUHAM, ada hak dasar yang tercantum di dalamnya, yaitu:

- 01 Hak untuk hidup
- 02 Hak untuk memperoleh kewarganegaraan
- 03 Hak untuk memiliki harta milik
- 04 Hak untuk menikah dan berkeluarga
- 05 Hak untuk tidak terganggu privasinya
- 06 Perlindungan hukum
- 07 Kesetaraan di depan hukum
- 08 Kebebasan dari kekerasan/penganiayaan
- 09 Kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama
- 10 Kebebasan berpendapat dan berekspresi
- 11 Kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai
- 12 Hak untuk memperoleh proses peradilan oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak
- 13 Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan di negaranya
- 14 Hak untuk memperoleh jaminan sosial
- 15 Hak untuk bekerja
- 16 Hak untuk memperoleh hari libur
- 17 Hak untuk memperoleh pangan, sandang, papan, dan perawatan kesehatan yang layak
- 18 Hak untuk memperoleh pendidikan
- 19 Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya di dalam masyarakat
- 20 Hak untuk memperoleh pemulihan efektif apabila hak-haknya dilanggar

Hak Asasi Manusia saling berkaitan, dan merupakan bagian dari sebuah kerangka kerja yang saling melengkapi. Misalnya, kemampuan seseorang untuk berperan secara aktif dalam pembangunan secara langsung dipengaruhi oleh hak dalam mengekspresikan diri, mendapatkan pendidikan, atau bahkan pemenuhan kebutuhan hidup seperti pangan dan perumahan.



Foto: Logo CRPD_Dok. Perhimpunan Jiwa Sehat

CRPD menjadi dasar perubahan perspektif Penyandang Disabilitas dari perspektif sebagai objek semata, menjadi pengakuan sebagai *rights-holders* (pemegang hak) dan bagian aktif dari masyarakat. Perkembangan cara pandang inilah yang menjadikan konsep Disabilitas terus berkembang, sebagai hasil dari interaksi antara *impairment* (hambatan fungsional) dengan hambatan perilaku dan lingkungan yang menjauhkannya dari partisipasi efektif dan penuh dalam masyarakat secara setara dengan anggota masyarakat lainnya.

Perspektif ini juga menempatkan negara sebagai *duty bearers* (pemangku kewajiban) yang memiliki kewajiban untuk menjalankan amanat. Artinya, Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang bersifat universal dan melingkupi semua aspek kehidupan.

Isu Disabilitas Adalah Isu HAM

Disabilitas merupakan isu Hak Asasi Manusia karena:



Penyandang Disabilitas mengalami ketidaksetaraan dalam jangka waktu lama. Ketidaksetaraan ini terjadi di berbagai bidang, misalnya seseorang ditolak mengakses layanan kesehatan, ditolak bersekolah, atau tidak memiliki suara dalam pemilu karena memiliki Disabilitas.



Penyandang Disabilitas menjadi sasaran kekerasan yang menjatuhkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Penyandang Disabilitas seringkali menjadi korban kekerasan, pelecehan, prasangka buruk, perundungan, atau bahkan tidak dihormati karena ke-Disabilitasnya.



Masih ada Penyandang Disabilitas yang tidak diberikan kesempatan untuk menentukan kemerdekaan dirinya, misalnya pemaksaan alat kontrasepsi, pemasangan, atau ketika Penyandang Disabilitas dianggap tidak cakap hukum karena Disabilitasnya.

Relasi kuasa yang tidak setara menyebabkan ada bagian dari masyarakat yang tidak mendapatkan haknya, dan hal ini berimbas pada beberapa hal seperti peminggiran (marginalisasi), diskriminasi dan eksklusi sosial yang pada ujungnya berdampak pada kemiskinan. Faktor inilah yang disebut sebagai kemiskinan struktural. Faktor kemiskinan struktural ini masih akan tetap ada karena ketimpangan relasi kuasa, dan tidak adanya upaya serius dalam advokasi dan memberdayakan kelompok masyarakat yang dipinggirkan.

Pendekatan Hak Asasi Manusia mengidentifikasi ketidaksetaraan relasi kuasa yang dialami Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia. Beberapa hal bisa dilakukan untuk mengurangi ketimpangan yang masih terus berlangsung, di antaranya:



Menghargai Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia sebagai elemen dari keberagaman manusia, dengan dasar yang sama dalam memandang keberagaman gender, agama, budaya, dan etnis. Melalui hal ini, prasangka, sikap dan hambatan lain terkait Disabilitas bisa tereduksi dan Penyandang Disabilitas bisa menikmati haknya



Mengakui Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia sebagai pemegang hak setara dengan orang lain. Hal ini berimbas pada pemberdayaan Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia untuk berpartisipasi di semua aspek kemasyarakatan, dan untuk menentukan pilihan secara mandiri, sekaligus untuk mengendalikan kehidupannya sendiri



Memandang pemerintah, baik itu pemerintah pusat, di tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota sampai pada pemerintah tingkat desa sebagai pemangku kebijakan yang bertanggungjawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inklusi penuh bagi Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia di masyarakat



Mempromosikan dialog antara Penyandang Disabilitas, orang lanjut usia, dan semua pemangku kepentingan yang relevan, dalam kaitannya untuk merealisasikan hak bagi Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia.



Pemenuhan Berdasarkan Hak

Pendekatan Hak Asasi Manusia menjadi landasan berpikir bahwa setiap program dan kegiatan bagi Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia dilaksanakan berbasis pada hak dan bukan kebutuhan. Prinsip dasar hak merinci bagaimana program dan kegiatan yang dilakukan itu dirumuskan, direncanakan, dilaksanakan, dan pada akhirnya di-monitoring dan dievaluasi.

Tabel berikut ini memberikan gambaran **perbedaan antara peletakan kerangka berpikir berdasarkan kebutuhan dan berdasarkan hak.**¹

Berdasarkan Kebutuhan	Berdasarkan Hak
Memberikan sumbangan pribadi	Tanggung jawab, kewajiban, tugas masyarakat secara umum, politik, moral dan hukum
Bersifat sukarela	Bersifat wajib
Karakteristik untuk kelompok, umum	Karakteristik secara individual
Berkaitan dengan amal, kesejahteraan	Berkaitan dengan hak atas hukum, tuntutan, jaminan, keadilan, kesetaraan, kebebasan

¹Saduran dari Child Rights Programming, International Save the Children Alliance dengan beberapa penyesuaian

Menjawab sebagian permasalahan dan hanya menyelesaikan masalah secara sementara	Menjawab permasalahan dari akarnya
Solusi jangka pendek	Solusi jangka panjang
Menurut urutan tingkat kebutuhan. Beberapa kebutuhan lebih penting dari kebutuhan yang lain (seperti kebutuhan akan makanan lebih dulu, baru kebutuhan akan pendidikan)	Hak tidak dapat dipisah-pisahkan, tidak dapat dibagi-bagi, dan tidak berdiri sendiri (karena hak-hak tersebut saling melengkapi)
Tidak sama di semua tempat, tergantung situasi, kondisi, dan lingkungannya	Berlaku sama di semua tempat (universal)
Menjawab sebagian tujuan yang ingin dicapai saja	Memiliki tujuan secara menyeluruh bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak yang setara
Bersifat pelayanan	Bersifat pemberdayaan dan penguatan hak
Memberikan pelayanan	Meningkatkan kesadaran semua kelompok (orang lanjut usia, anak-anak, pembuat kebijakan)
Proyek tertentu dengan	Pendekatan menyeluruh

target kelompok penyandang disabilitas tertentu (pendekatan secara parsial)	
Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia layak mendapatkan bantuan	Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia berhak mendapatkan bantuan
Pemerintah harus melakukan sesuatu, tetapi tidak ada kejelasan mengenai siapa dan bagaimana kewajiban tersebut harus dilakukan	Pemerintah memiliki kewajiban yang terikat secara hukum untuk dilaksanakan, dan kewajiban moral untuk melaksanakannya
Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia dapat berpartisipasi untuk memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada mereka	Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia dapat berpartisipasi secara aktif berdasarkan haknya dalam segala aspek kehidupan
Karena sumber daya yang terbatas, beberapa Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia mungkin terabaikan	Semua Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia memiliki potensi untuk berperan dalam masyarakat dan mendapat kesempatan yang setara untuk memenuhi potensi tersebut

Setiap pekerjaan memiliki tujuan tersendiri tetapi tidak ada pemersatu bagi seluruh tujuan tersebut	Ada tujuan besar bersama di mana semua pekerjaan berperan untuk mewujudkan tujuan besar tersebut
---	--

Secara jelas, UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari bencana. Hak tersebut adalah:

- Mendapatkan informasi bencana yang mudah diakses
- Memperoleh pengetahuan mengenai pengurangan risiko bencana
- Mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi ketika keadaan bencana
- Memperoleh fasilitas dan sarana penyelamatan yang aksesibel dan mudah diakses
- Mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian

Bagian D: Akomodasi dan Adaptasi yang Dibutuhkan dalam Pengurangan Risiko Bencana yang Inklusif



Ilustrasi: Flood Disaster_Image by Freepik

Pengurangan risiko bencana bagi seluruh elemen masyarakat saat ini menjadi sebuah hal yang signifikan dan penting sebagai sebuah pengetahuan mendasar mengenai hal yang harus diketahui dan dilakukan ketika terkait dengan kebencanaan. Hal ini didasarkan pada posisi geografis Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi bencana yang tinggi, ditambah lagi ancaman perubahan iklim yang menjadikan langkah pengurangan risiko bencana menjadi krusial.

Pembahasan aspek pengurangan risiko bencana juga berkembang, bukan lagi didominasi oleh kajian ilmu-ilmu pasti yang fokus pada aspek fisik sebagai sarana penanggulangan bencana. Pengurangan risiko bencana juga telah merambah ke

kajian ilmu-ilmu sosial, yang fokus pada aspek perilaku manusia dalam mempersepsikan bencana itu.

Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (2015-2030) yang diluncurkan Badan PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana dan disahkan oleh negara-negara di dunia menggarisbawahi pergeseran mindset yang awalnya hanya berfokus pada tanggap darurat, saat ini juga fokus pada pengelolaan risiko bencana.

Bencana saat ini bukan lagi dipandang sebagai fenomena yang terjadi secara tiba-tiba, namun sebagai peristiwa yang bisa dikaji, dikelola dan dikurangi risikonya dengan mengedepankan aspek manusia sebagai pusat pengurangan risiko bencana. Kajian kebencanaan berbasis manusia menempatkan unsur keselamatan (*safety*), yang kemudian membawa gagasan kerentanan (*vulnerability*) sebagai pranata sosial.

Dalam kaitannya dengan sudut pandang Hak Asasi Manusia, ketimpangan kuasa yang dialami oleh Penyandang Disabilitas dan kelompok marginal lainnya menempatkannya sebagai kelompok yang memiliki kerentanan tinggi dalam konsep bencana.

Empat Prinsip Inklusi

Kesadaran



Foto: Kesadaran jadi awal dukungan untuk Disabilitas fisik di komunitas sekitar Sungai Gajah Wong. Dok. PB Palma

Kesadaran menjadi faktor utama dalam menciptakan inklusi Disabilitas dan orang lanjut usia dalam pengurangan risiko bencana. Hal ini karena Penyandang Disabilitas telah lama mendapatkan stigma dan diskriminasi, sehingga keberadaannya menjadi

tersembunyi dan jarang ditemui di ruang-ruang publik.

Masih banyak orangtua yang menyembunyikan anak-anak dengan Disabilitas karena persepsi negatif yang masih melingkupi Penyandang Disabilitas, dan persepsi negatif ini masih banyak diyakini oleh masyarakat. Bahkan, tidak jarang Penyandang Disabilitas sendiri yang masih meyakini persepsi negatif tersebut sehingga mereka memiliki tingkat kepercayaan diri dan kemandirian yang rendah. Selain itu, aksesibilitas fisik masih menjadi kendala Penyandang Disabilitas untuk beraktivitas di luar rumah.

Prinsip kesadaran menjadi penting untuk memastikan para pihak yang terlibat dalam program pengurangan risiko bencana memiliki pengetahuan memadai untuk mengakui hambatan Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia untuk bisa berpartisipasi aktif. Selain itu, penyadaran prinsip hak asasi manusia menjadi dasar pemikiran mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memetakan program penanggulangan bencana yang inklusi.

Pelibatan



Foto: Pelibatan Penyandang Disabilitas melalui deklarasi komitmen bersama oleh pemangku kepentingan. Dok. YEU/Dika

Nothing about us without us menjadi dasar penyelenggaraan semua hal terkait Penyandang Disabilitas. Artinya, Penyandang Disabilitas sebagai subjek aktif sekaligus pemegang hak

menjadi pihak yang wajib untuk dilibatkan dalam setiap hal yang berkaitan dengan Disabilitas. Ketika pelibatan secara penuh dan efektif terjadi, program yang dilaksanakan bisa mewakili kebutuhan dan kepentingan mereka. Idealnya,

pelibatan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi untuk memastikan aspek pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia.

Dampaknya, selain Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia terjamin haknya, para pihak yang terlibat dalam program pengurangan risiko bencana secara bersama-sama belajar untuk memastikan inklusivitas, di mana semua orang tanpa kecuali bisa diakomodasi di dalamnya. Pelibatan Penyandang Disabilitas bisa juga melalui pelibatan orang-orang terdekatnya seperti keluarga maupun caregiver (pendamping), ataupun melalui Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) dan komunitas Disabilitas lain yang bisa mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas.

Aksesibilitas

Aksesibilitas dapat diartikan sebagai pemberian kesempatan serta penyediaan sarana dan prasarana yang memungkinkan Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia berpartisipasi.

Desain universal



*Foto: Audit aksesibilitas di barak pengungsian Kalurahan Kepuharjo
_Dok. CIQAL*

Desain universal merupakan prinsip desain produk, lingkungan, sistem, metode, bangunan, teknologi, program, ataupun penilaian yang memungkinkan semua orang bisa menggunakannya semaksimal mungkin. Hal ini digunakan untuk memastikan lingkungan yang mudah diakses, dipahami, dan digunakan oleh semua orang tanpa

memandang usia, gender, status sosial, maupun kondisi Disabilitasnya. Dengan memastikan desain universal dalam pengurangan risiko bencana, semua orang yang terlibat di dalamnya bisa menggunakan dan mendapatkan manfaat.



Akomodasi yang layak



Akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*) diartikan sebagai modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

Tujuan dari prinsip ini adalah memberikan kesempatan yang setara yang memungkinkan Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia terlibat aktif dalam program penanggulangan bencana. Akomodasi yang layak tidak mengubah fungsi esensial dari tempat, program, atau produk. Penyesuaian akomodasi yang layak didasarkan pada sisi rasionalitas dan kebutuhan masing-masing individu.

Dukungan



Foto: Lansia petani Ngudi Mulya memperoleh dukungan untuk tetap berkarya aktif. Dok. YEU/Lorenzo

Prinsip dukungan didasarkan pada kebutuhan Penyandang Disabilitas yang berbeda dengan non-Disabilitas, bahkan antara satu Penyandang Disabilitas dengan lainnya terkadang juga memiliki kebutuhan yang berbeda.

Oleh karena itu, dukungan yang diperlukan untuk memastikan pelibatan aktif Penyandang Disabilitas maupun orang lanjut usia harus dibuat spesifik dan bersifat individual. Dukungan khusus tidak serta merta sama dengan perlakuan khusus, karena dukungan melekat pada aspek pemenuhan hak sedangkan ketika berada di tengah masyarakat, Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia tetap mendapatkan perlakuan yang setara dengan anggota masyarakat lainnya.

Bagian E: Mendorong Program yang Inklusif

Langkah 1: Identifikasi dan pendataan Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia



Foto: Pendataan penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok berisiko lainnya sebagai langkah awal inklusi. Dok. PB Palma

Langkah awal dalam mendorong inklusi adalah membuat identifikasi Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia secara cermat. Langkah ini bukan hanya dengan mengidentifikasi ragam Disabilitas beserta kebutuhannya saja, tapi lebih jauh menginventarisasi hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk mendorong Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia untuk bisa berpartisipasi secara efektif. Sebaliknya, identifikasi juga mencakup hal-hal apa saja yang berpotensi menjadi hambatan bagi Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia untuk berpartisipasi.



Dengan berpatokan pada prinsip Hak Asasi Manusia, langkah ini perlu dilakukan secara spesifik dan bersifat individual. Artinya, identifikasi dan pendekatan yang dilakukan dalam tahap ini berbeda antara satu orang dengan orang yang lain, meskipun ragam Disabilitasnya maupun rentang usianya bisa jadi sama.

Studi Kasus 1

Desa Sudimoro terletak di sebuah wilayah pegunungan yang sejuk. Sebagian besar penduduk bekerja menggarap ladang yang ditanami berbagai jenis sayuran. Desa ini merupakan satu kawasan yang berada dekat dengan puncak gunung berapi sehingga kerap mengalami ancaman letusan. Berkali-kali desa ini diguyur hujan abu ketika terjadi letusan gunung berapi. Bahkan ketika terjadi letusan besar, warga harus mengungsi.

Meski begitu sebagian besar warga menolak untuk direlokasi. Karena lahan di situ subur, ladang sayuran yang menjadi sumber mata pencaharian utama penduduk.

Kepala Desa Sudimoro bersama dengan organisasi yang fokus di isu kebencanaan melakukan pelatihan sebagai salah satu upaya membangun Desa Tangguh Bencana. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah serangkaian pelatihan untuk peningkatan kapasitas penduduk. Di antara penduduk, ada dua orang Penyandang Disabilitas fisik yang akan diundang mengikuti pelatihan. Profil mereka adalah sebagai berikut:

01



Ibu Aminah, berusia 40 tahun, adalah seorang Penyandang Disabilitas fisik yang bekerja sebagai buruh ladang. Dia terkena polio di kaki kanan pada usia balita. Seiring perkembangan usia dan aktivitas fisik yang berat, ibu Aminah harus menggunakan tongkat ketiak untuk menopang aktivitas sehari-hari.

Ibu tiga orang anak ini pernah mengenyam pendidikan sampai kelas enam sekolah dasar (SD) namun tidak sampai tamat. Dia memutuskan keluar dari sekolah karena tidak tahan mendapat olok-olok di sekolah karena Disabilitasnya. Sehari-hari, perempuan ini tinggal bersama suami yang merupakan tetangga kampung. Mereka bekerja bersama menggarap ladang dan jarang keluar kampung, mereka hanya sesekali pergi ke pasar untuk menjual hasil ladang.

02



Bapak Abdullah, berusia 43 tahun, adalah seorang Penyandang Disabilitas fisik yang bekerja sebagai peternak sapi. Dia juga terkena polio sewaktu masih kecil sehingga kaki kiri harus dipasang brace. Dalam beraktivitas sehari-hari dia tidak menggunakan tongkat, hanya sesekali memegang lutut ketika berjalan.

Bapak dua anak ini lulus dari madrasah aliyah negeri (MAN), dan memiliki istri yang dulu adalah teman sekolahnya. Selain beternak, dia juga menjadi ketua Kelompok Disabilitas di tingkat Desa. Pak Abdullah sering ikut rapat Penyandang Disabilitas di tingkat kabupaten. Oleh karena itu, dia sudah beberapa kali ikut pelatihan mengenai organisasi, kepemimpinan juga hak Penyandang Disabilitas.

Dari penggambaran kasus di atas, terlihat meskipun Ibu Aminah dan Pak Abdullah memiliki jenis Disabilitas yang sama, namun asesmen yang dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan dalam mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas berbeda.

Lembar Latihan

Tabel di bawah ini bisa digunakan untuk melengkapi asesmen terhadap dua orang ini. Isilah dengan uraian apa saja yang diperlukan dalam melakukan asesmen bagi Ibu Aminah dan pak Abdullah dalam mengikuti pelatihan:

	Aminah	Abdullah
Usia		
Gender		
Disabilitas		
Latar belakang Pendidikan		
Latar belakang kapasitas yang dimiliki		
Pendampingan yang dibutuhkan untuk bisa berpartisipasi efektif		
Hal lain yang bisa menjadi poin asesmen (gunakan bagian kosong di bawah jika diperlukan)		



Melakukan Analisis Pengisian Lembar Latihan

Cerita kasus di atas merupakan penggambaran dari individu, yang meskipun memiliki jenis Disabilitas yang sama, namun latar belakangnya berbeda, sehingga keduanya memiliki kebutuhan yang berbeda untuk bisa berpartisipasi dalam pelatihan.



Ilustrasi: People with disability_Image by Freepik

Faktor interseksionalitas menjadi kunci penting dalam melakukan analisis jawaban yang dituliskan dalam lembar pelatihan. Semakin banyak faktor interseksional, semakin rentan individunya, sehingga pendekatan yang dilakukan untuk memastikan partisipasinya menjadi semakin banyak.

Dari penggambaran kasus di atas, terlihat meskipun Ibu Aminah dan Pak Abdullah memiliki jenis Disabilitas yang sama, namun asesmen yang dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan dalam mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas berbeda.

Dari jenis Disabilitas dan usia, Ibu Aminah dan Pak Abdullah ini memiliki rentang usia yang tidak berbeda jauh sehingga tidak berpengaruh terhadap analisis jawaban. Mereka merupakan Penyandang Disabilitas fisik, dengan rentang usia 40 tahunan. Namun ketika berbicara mengenai gender, terlihat banyak hal yang bisa membuat kehidupan mereka berbeda jauh. Relasi gender yang tidak setara menjadikan kerentanan bagi perempuan. Perempuan, dengan ataupun tanpa Disabilitas secara umum memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Di samping itu dalam pengambilan keputusan, mulai dari tataran lingkungan terkecil di keluarga, perempuan acapkali memiliki peran yang lebih kecil.

Terkait dengan perempuan Disabilitas, faktor interseksional yang meminggirkan menjadi berlipat, sebagai gender minoritas dan hidup dengan Disabilitas. Seperti pada contoh di atas, perundungan yang diterima oleh Ibu Aminah menjadikan salah satu sebab dia tidak meneruskan pendidikan. Di mana hal ini tidak berlaku pada Pak Abdullah.

Dilihat dari pelayanan kesehatan dasar, Pak Abdullah memiliki akses yang lebih baik dengan adanya alat bantu berupa brace. Sementara itu, Ibu Aminah yang tidak mendapatkan alat bantu apapun mengalami penurunan fungsi tubuh, sehingga kemudian bertopang pada tongkat ketiak. Akses terhadap pelayanan kesehatan dasar ini juga pada akhirnya berkorelasi dengan kualitas hidup Penyandang Disabilitas.

Faktor lain yang menjadikan tingkat partisipasi Pak Abdullah lebih optimal adalah pengalamannya dalam Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD). Pengalaman ini menjadikannya memiliki akses untuk meningkatkan kapasitas, sekaligus terbiasa memberikan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan sejenis.

Oleh karena itu, pendekatan yang diberikan kepada keduanya tentu saja berbeda. Semakin banyak faktor interseksionalitas

yang bisa digali dari contoh cerita penggambaran di atas, semakin Anda memahami dan mampu merancang asesmen terbaik yang menjadi dasar pendekatan agar kedua orang ini bisa berpartisipasi dalam merancang pelatihan, ataupun program dan kegiatan lainnya.

Dalam melakukan asesmen, metode yang bisa dilakukan adalah melakukan wawancara langsung dengan Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia. Metode lain bisa dilakukan dengan mewawancarai keluarga atau orang di sekitarnya, atau bisa juga mewawancarai tokoh masyarakat dan perangkat desa di wilayah tersebut. Kesemua hal ini mendukung identifikasi terhadap semua hal dalam membuat partisipasi Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia menjadi optimal.

Hal lain yang perlu dilakukan dalam proses identifikasi ini adalah melakukan asesmen terhadap lingkungan yang ada di sekitar Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia, misalnya aksesibilitas lokasi yang digunakan untuk pelatihan. Selain itu, perlu juga dikaji data yang dimiliki oleh desa terkait dengan kondisi sosial dan faktor lokalitas penduduk desa. Proses identifikasi ini terkadang tidak bisa dilakukan dalam satu atau dua kali pertemuan saja dalam beberapa kasus yang cukup rumit. Ketika hambatan yang dimiliki Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia lebih dari satu, pendekatan yang dilakukan untuk membuat mereka bisa berpartisipasi perlu berulang dan butuh proses yang lebih panjang.

Proses yang tidak kalah pentingnya adalah merancang metode pelatihan yang mudah dipahami oleh semua peserta, serta memberikan cukup kesempatan bagi semua peserta untuk bisa terlibat aktif di dalamnya.

Langkah 2: Meningkatkan kapasitas



Foto: Pelatihan membuat pupuk organik dan pestisida hayati bersama petani lansia_Dok. Ngudi Mulya

Peningkatan kapasitas bagi Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia menjadi salah satu hal penting dalam upaya menjadikan program penanggulangan bencana menjadi inklusi. Selama ini, Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia banyak tertinggal dalam kehidupan masyarakat karena masih belum mendapatkan hak secara setara. Misalnya, dalam hal pendidikan, layanan kesehatan, dan partisipasi politik.

Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia agar mampu bersuara dan menyalurkan pendapatnya. Selama ini, banyak dari mereka yang memilih diam karena tidak memahami dengan baik apa saja hak yang dimiliki. Ditambah lagi, prasangka, yang berdasar pada mitos yang masih mengelilingi Penyandang Disabilitas dan dipercayai masyarakat, menjadikan Penyandang Disabilitas masih terkungkung stigma. Dengan memahami lebih baik mengenai haknya, Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia mampu menyuarakan dengan lebih baik apa yang mereka butuhkan, karena Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia itu sendiri yang lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan mereka.



Foto: Pemerintah perlu memiliki pemahaman memadai untuk mengakomodasi lansia seperti Ibu Senen, petani lansia di Gunungkidul, DIY_Dok. YEU/Lorenzo

Di sisi lain, meningkatkan kapasitas masyarakat, pemerintah, maupun para pihak lainnya mengenai pendekatan Hak Asasi Manusia dalam menjalankan prinsip inklusivitas juga tidak kalah pentingnya. Dengan pemahaman yang memadai mengenai Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia, para pihak terkait mampu membuka pandangan secara lebih luas dalam mengakomodasi Disabilitas dan orang lanjut usia sebagai bagian dari anggota masyarakat. Selain itu, peningkatan kapasitas juga diperlukan dalam

rangka membangun pandangan yang benar mengenai Penyandang Disabilitas, sehingga mengurangi anggapan keliru dan persepsi negatif yang selama ini masih banyak dipercayai oleh sebagian besar masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan kapasitas, media dan cara penyampaian yang aksesibel dan mudah dipahami perlu menjadi perhatian serius. Materi dengan banyak gambar visual bisa jadi tidak aksesibel bagi Disabilitas netra, sebaliknya materi dengan paparan yang panjang dan menggunakan bahasa rumit menjadi kurang aksesibel bagi Tuli, Disabilitas mental dan intelektual, maupun orang lanjut usia. Oleh karena itu, penyesuaian materi dan cara penyampaian perlu disesuaikan dengan orang yang menerima materi tersebut agar informasi yang disampaikan terserap dengan baik.

Langkah 3: Partisipasi Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia



Foto: Penyandang Disabilitas mampu berpartisipasi melalui berbagai cara, tidak hanya sebagai penerima manfaat_Dok. CIQAL

Berbekal identifikasi yang memadai melalui serangkaian proses asesmen yang disusun secara rinci dan cermat, partisipasi Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia diharapkan menjadi optimal. Ditambah lagi, Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia dengan kapasitas memadai dapat bersuara dengan lebih baik dalam mengeluarkan pendapatnya dan menjadi bagian dari masyarakat sadar bencana.

Dalam partisipasi ini, perlu diperhatikan untuk menghindari standardisasi bagi individu yang terlibat dalam program atau kegiatan. Masing-masing individu, baik Penyandang Disabilitas maupun non-Disabilitas, memiliki partisipasi yang beraneka ragam. Pendekatan program dengan memberikan standar partisipasi yang diberikan oleh masing-masing individu menjadi sebuah kemunduran bagi penerapan prinsip inklusi.

Studi Kasus 2

Dalam sebuah pelatihan mengenai pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat yang dilaksanakan di Desa Sudimoro, terdapat 30 peserta yang terdiri dari: 10 peserta laki-laki non-Disabilitas, 10 peserta perempuan non-Disabilitas, 5 peserta laki-laki dengan beragam jenis Disabilitas, dan 5 peserta perempuan dengan beragam jenis Disabilitas. Dari 30 orang yang peserta, terdapat 2 peserta Tuli. Mereka adalah:

01



Tumini, perempuan berusia 25 tahun, pernah mengenyam pendidikan hingga lulus sekolah menengah atas luar biasa (SMALB). Saat ini, ia bekerja di sebuah perusahaan konveksi di bagian menjahit. Dia menguasai bahasa isyarat Bisindo sehingga dalam mengikuti pelatihan dia didampingi seorang Juru Bahasa Isyarat.

Dia juga memiliki ponsel Android, sehingga terkadang berkomunikasi dengan peserta lain yang tidak bisa berbahasa isyarat melalui pesan teks di ponsel. Meskipun tata bahasa Tumini kadang terbalik, dia bisa berkomunikasi dengan baik karena orang yang diajak komunikasi paham apa yang dia maksudkan. Dalam diskusi, dia banyak memberikan masukan terutama kaitannya dengan apa yang dibutuhkan Tuli dalam program pengurangan risiko bencana.

02



Jayanti, perempuan berusia 30 tahun, belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Sehari-hari dia tinggal bersama keluarganya dan bekerja membantu kakaknya menerima pesanan jahitan borongan di rumah. Dia tidak bisa berbahasa isyarat Bisindo, dia hanya berkomunikasi dengan bahasa ibu yang

hanya dikuasai oleh orang yang tinggal di rumahnya dan tetangga di dekatnya. Oleh karena itu, dalam mengikuti pelatihan ini Jayanti dibantu oleh kakaknya yang memfasilitasi komunikasi bagi Jayanti, sekaligus menjelaskan hal-hal yang dipelajari selama pelatihan. Ketika diskusi berlangsung, Jayanti lebih banyak diam dan mengamati apa yang terjadi selama pelatihan, ketika ditanya dia hanya mengangguk dan menggelengkan kepala. Tetapi senyum tidak pernah luntur dari wajahnya, dia senang karena bisa keluar rumah dan mengikuti pelatihan ini.

Lembar Latihan

	Tumini	Jayanti
Jenis Partisipasi		
Hambatan		
Pembelajaran yang diperoleh peserta lain dari partisipasi mereka		
Pembelajaran yang diperoleh penyelenggara pelatihan dari partisipasi mereka		



Melakukan Analisis Pengisian Lembar Latihan

Cerita dalam studi kasus 2 ini memberikan pengayaan bagi Anda bagaimana memahami bagaimana pendekatan berbasis HAM sebaiknya diterapkan dalam mengelola kegiatan atau program yang inklusif. Meskipun Tumini dan Jayanti memiliki jenis Disabilitas dan gender yang sama, serta rentang usia yang tidak jauh berbeda, pendekatan berbeda diperlukan untuk membuat mereka berpartisipasi secara optimal.

Oleh karena itu, pendekatan yang berbasis individual perlu diterapkan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau program. Selain itu, jenis partisipasi masing-masing individu tidak bisa juga disamakan, ada individu yang sangat aktif memberikan komentar dan tanggapan, sebaliknya ada yang masih belum percaya diri mengemukakan pendapat di depan umum. Sehingga, penerapan standar partisipasi tidak bisa diseragamkan antara satu orang dengan orang lainnya.

Di sisi lain, partisipasi yang beragam ini juga membantu memperkaya pelaksana kegiatan atau program dalam melakukan analisis kegiatan. Lembar pengisian pada dua pertanyaan di bawah merupakan pertanyaan untuk memandu Anda melakukan asesmen secara mandiri bagaimana Anda mengambil pembelajaran dari partisipasi yang diberikan oleh setiap individu, dan bagaimana hal ini mampu menjadi bahan analisis proses inklusi yang sedang Anda laksanakan.

Dari studi kasus 2 di atas, dua orang perempuan Tuli yang ikut pelatihan memberikan partisipasi yang jauh berbeda. Tumini memberikan banyak masukan yang berguna dalam membangun program pengurangan risiko bencana yang sensitif terhadap keberadaan Tuli. Hal ini berguna dalam mendorong program pengurangan risiko bencana menjadi lebih inklusif. Sementara Jayanti tidak memberikan masukan sebanyak Tumini karena hanya mengangguk dan menggeleng.

Namun begitu, bukan berarti partisipasi Jayanti tidak penuh dan efektif. Dengan apa yang dia berikan selama proses pembelajaran berlangsung, partisipasinya bisa jadi sudah optimal. Sehingga standardisasi serta merta tidak bisa diberikan, bahwa Tumini memberikan partisipasi yang lebih baik dari pada Jayanti, karena proses dan cara yang mereka lalui juga beragam. Mengakomodasi partisipasi yang diberikan oleh setiap individu menjadi sebuah langkah dalam membangun inklusivitas itu sendiri karena jenis partisipasi masing-masing individu bisa jadi sangat beragam.

Di sisi lain, keberadaan Jayanti justru memberikan sebuah pembelajaran juga bagi peserta lainnya, bagaimana mengupayakan sebuah program yang bisa mengakomodasi hak seperti Jayanti atau Penyandang Disabilitas lain yang memiliki hambatan komunikasi serupa.

Langkah 4: Membangun rasa kepemilikan terhadap program



Foto: Pelibatan komunitas mitra DIFAGANA DIY untuk membangun rasa kepemilikan_Dok. YEU

Faktor kelokalan menjadi sebuah hal yang penting diperhatikan dalam menciptakan inklusivitas di program penanggulangan bencana. Karena pada akhirnya, pihak yang banyak berperan aktif dalam kegiatan terkait di program penanggulangan bencana adalah masyarakat dan pemerintah setempat.

Oleh karena itu, pelibatan aktor lokal secara utuh dalam program ini perlu dilakukan dengan mengedepankan rasa kepemilikan terhadap program yang sedang berlangsung. Hal ini dilakukan dengan melibatkan mereka di setiap aspek pelaksanaan program dan menjadikan mereka sebagai pemilik dari program ini. Tidak terkecuali dengan menggandeng Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia yang berada di wilayah tersebut, karena pada prinsipnya mereka menjadi bagian dari aktor lokal ini.

Penyokong dana, pemilik ide program, organisasi pendamping masyarakat, atau siapapun yang memiliki peran dalam menginisiasi program penanggulangan bencana sejatinya hanya berperan di awal dan masa pelaksanaan program saja. Pada kelanjutannya, keberlanjutan program yang dijalankan sangat bergantung pada aktor lokal ini, sehingga rasa kepemilikan terhadap dari program yang dijalankan harus mulai dibangun sejak awal pengenalan program, dan secara konsisten dibangun untuk pelaksanaan program penanggulangan bencana yang inklusif dan berkelanjutan.

Studi Kasus 3

Warga perumahan Gunung Asri sedang melaksanakan program "Bakti Sosial Bank Sampah" yang bertujuan untuk memilah sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh warga di perumahan. Program ini dilaksanakan dengan setiap rumah tangga menyetorkan sampah yang sudah dipilah ke dalam 3 jenis, yaitu: sampah organik, sampah non-organik, dan sampah yang bisa didaur ulang. Warga tinggal memasukkan sampah pada bak-bak penampung yang sudah diberi tanda sesuai jenisnya.

Secara berkala, sampah yang terkumpul akan dikelola sesuai dengan jenisnya. Sampah organik akan diproses menjadi pupuk tanaman. Sampah non-organik yang berupa plastik disetorkan pada sebuah komunitas pemuda sadar lingkungan untuk diproses menjadi bahan baku paving. Sedangkan sampah yang bisa didaur ulang akan dijual kepada pengepul. Uang yang terkumpul dari hasil pengelolaan sampah ini digunakan untuk membiayai kegiatan sosial warga di perumahan.

Ibu-ibu warga perumahan yang lebih aktif mengelola kegiatan ini, mereka yang memilah sampah rumah tangga, mengumpulkan, dan mengelolanya secara bersama-sama. Sebagian besar warga sudah memahami dengan baik kegiatan

dalam program ini, namun para ibu mengeluh dengan Ibu Maryam (65 tahun) dan Ibu Samini (72 tahun).

Ibu Maryam sejak setahun lalu didiagnosa mengidap demensia, dia sering kebingungan dan salah memasukkan sampah yang sudah dipilah ke dalam bak sesuai jenisnya. Akibatnya, beberapa kali warga harus memilah ulang sampah sudah terkumpul.

Sedangkan Ibu Samini mengalami kesulitan memahami aturan program ini. Berulang kali dia salah menyortir sampah, seperti mengemas kulit buah-buahan ke dalam kantong plastik lalu memasukkannya ke bak sampah organik.

Menanggapi keluhan warga, Ibu Ketua PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) mengajak diskusi melalui grup WhatsApp. Sejumlah usulan ditampung dan dibahas guna mencari cara penyelesaian terbaik. Akhirnya, diperoleh 2 cara penyelesaian berbeda, yaitu:

01

Warga berinisiatif mengecat bak sampah yang semula berwarna hitam diganti dengan warna terang dan berbeda beda, hijau untuk sampah organik, merah untuk sampah non-organik, dan kuning untuk sampah yang bisa didaur ulang. Cara ini digunakan untuk memudahkan Ibu Maryam mengingat jenis sampah.

02

Ibu Fatimah, anak dari Ibu Samini yang tinggal di perumahan sebelah, diajak ketika pengelola program menjelaskan aturan-aturan program. Ibu Fatimah juga yang nantinya akan digandeng untuk mendampingi ketika ibunya memilah-milah sampah dan memberikan penjelasan sehingga ibunya mampu melaksanakan program ini dengan benar.

Pertanyaan untuk Diskusi:

01

Dari cerita di atas, pembelajaran apa yang Anda peroleh terkait dengan partisipasi Ibu Maryam dan Ibu Samini dalam program “Bakti Sosial Bank Sampah”?

02

Apakah penyelesaian yang diusulkan warga sudah tepat dalam mengatasi permasalahan yang ada? Jika sudah, berikan alasannya?

03

Jika penyelesaian yang diusulkan warga menurut Anda belum tepat dalam mengatasi permasalahan yang ada, usulkan cara penyelesaian lain yang menurut Anda lebih tepat!

Melakukan Analisis Menjawab Pertanyaan untuk Diskusi

Menjawab pertanyaan 1

Dalam menjawab pertanyaan di atas, Anda perlu memilah ada dua hal mendasar yang membedakan kedua orang lanjut usia di atas. Ibu Maryam, meskipun usianya lebih muda, memiliki Disabilitas terkait demensia yang dimilikinya. Sementara itu, Ibu Samini, meskipun tidak memiliki Disabilitas, memerlukan pendekatan khusus untuk memahamkan suatu hal yang mungkin masih baru baginya.

Menjawab pertanyaan 2

Penyelesaian yang diberikan kepada Ibu Maryam mengacu pada 50 jenis alat bantu menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), yaitu rak berwarna untuk obat. Prinsip alat bantu ini mengacu pada pemberian warna yang berbeda untuk memudahkan mengingat dalam menjadwalkan meminum obat. Penyandang Disabilitas dengan hambatan mengingat memiliki kesulitan untuk mengurai informasi yang kompleks, sehingga penyederhanaan dalam bentuk warna membantu mengurai kesulitan ini. Oleh karena itu, mengecat bak sampah dengan warna yang berbeda-beda diharapkan mampu memudahkan Ibu Maryam mengingat jenis-jenis sampah yang harus dipilah, ketimbang membaca tulisan di bak sampah.

Adapun penyelesaian yang diusulkan pada Ibu Samini, merupakan bentuk penyelesaian yang sesuai dengan praktik baik salah satu inovator YEU, yaitu Ngudi Mulya. Kelompok tani yang berlokasi di Kabupaten Gunungkidul ini telah berhasil meningkatkan partisipasi petani lanjut usia dalam penguasaan teknologi, dengan menggandeng anggota keluarganya. Oleh karena itu, penyelesaian ini diharapkan menjadi salah satu solusi yang berangkat dari praktik baik yang bisa diterapkan

untuk meningkatkan partisipasi orang lanjut usia.

Menjawab pertanyaan 3

Pertanyaan ini sebenarnya merupakan pertanyaan terbuka yang memberikan Anda kesempatan untuk menawarkan penyelesaian terhadap kasus yang dihadapi terkait orang lanjut usia. Jika Anda memiliki pengalaman, cerita atau praktik baik terkait dengan hal ini Anda bisa menuliskannya dan menjadikannya sebagai salah satu solusi berbasis bukti.

Daftar Pustaka

Anonim (2007), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Anonim (2011), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Anonim (2011), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Bolthe, P (2014), Empowerment and Participation: Good Practices from South and South-East Asia in Disability Inclusive Disaster Risk Management, Handicap International

Emir, R dan Rizky, U.F (2017), Menjadi Perusahaan Inklusi: Panduan Praktis Inklusi Disabilitas Untuk Penyedia Kerja, Saujana Press, Yogyakarta

Worm, I (2012), A Human Based Approach to Disability in Development Entry Points for Development Organizations, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Child Rights Programming (2002), How to Apply Rights-based Approach in Programming. Handbook for International Save The Children Alliance Members. International Save The Children Alliance. UK;

Harris, A dan Enfield, S (2003), Disability, Equality and Human Rights: A Training manual for development and humanitarian organization. Oxfam and ADD

WHO (1999), Men, Ageing and Health, diunduh dari

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/66941/WHO_NMH_NPH_01.2.pdf;jsessionid=4718477ECA2AB9B38264BC94616C1AC6?sequence=1

WHO (2022), Ageing, diambil dari
https://www.who.int/health-topics/ageing#tab=tab_3

Praktik-praktik Baik di Lapangan



Membuat Program Penanggulangan Bencana, Bukan Membuat Program Baru



Foto: Doddy Kaliri memperkenalkan Difgandes di ALL4DR di Brisbane. Dok. SEEDS India/UNDRR

Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebagai satu wilayah di Indonesia yang kerap dilanda bencana. Terdapat beragam jenis bencana mulai dari kekeringan, puting beliung, gempa, kekeringan, dan, yang paling sering terjadi, erupsi Gunung Merapi.

Doddy Kaliri, salah satu pegiat Disabilitas di Jogja mencatat setidaknya telah mengalami tiga kali bencana paling besar yaitu gempa di 2006 dan erupsi Merapi di 1993 serta di 2010.

"(Bencana) paling menakutkan menurut saya adalah gempa Jogja tahun 2006. Takut karena belum pernah mengalami gempa sebesar itu, dan saya sebagai Penyandang Disabilitas bingung bagaimana harus menyelamatkan diri," ungkapnya.

Ketakutan itu juga dirasakan oleh sebagian besar masyarakat yang mengalami kejadian itu. Hal ini karena pada saat gempa melanda, masyarakat masih belum memiliki pengetahuan memadai sehingga masih bingung harus berbuat apa. Ditambah lagi, munculnya informasi yang sebagian besar menyesatkan pascakejadian gempa membuat masyarakat semakin panik.

Setahun setelah gempa, upaya pengurangan risiko bencana mulai dilaksanakan. Saat itu, Doddy terlibat aktif sebagai trainer pengurangan risiko bencana bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya. Dari kegiatan ini, pegiat Disabilitas yang sudah berkali-kali terlibat dalam pelatihan penguatan kapasitas dan

pendidikan politik ini menjadi lebih sadar mengenai pentingnya prinsip inklusi dalam penanggulangan bencana.

Melalui DIFAGANA DIY (Difabel Siaga Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta), sampai saat ini Doddy tetap konsisten mendorong inklusivitas dalam penanggulangan bencana. Kendala yang diakui dirasakannya bahwa isu bencana saat ini belum menjadi isu prioritas dalam pembangunan. Keberadaannya masih tertinggal dibandingkan isu dasar lain seperti pendidikan, lapangan kerja, dan kesehatan.

Selain itu, pemerintah juga masih menganggap bahwa membangun program penanggulangan bencana inklusif artinya sama dengan membuat program penanggulangan bencana yang baru, yang imbasnya memerlukan anggaran baru. Padahal, sejatinya yang diperlukan adalah memasukkan aspek Disabilitas dalam skema kontinjensi yang sudah ada. Oleh karenanya, dia mengharapkan ada lebih banyak Penyandang Disabilitas yang terlibat aktif di isu bencana. "Karena bencana ini tidak mungkin dihindari, yang mungkin adalah dikelola. Oleh karena itu, Penyandang Disabilitas sebagai peer-support menjadi penting. Dan ini belum banyak dilakukan," jelasnya.

DIFAGANA merupakan salah satu inovator lokal YAKKUM Emergency Unit (YEU) yang memperkenalkan aplikasi DIFAGANA Disaster Emergency Support (Difgandes). Aplikasi ini berfungsi untuk mempermudah akses informasi tentang bencana bagi Penyandang Disabilitas netra dan Tuli. Dalam forum internasional the Asian Local Leaders Forum for Disaster Resilience (ALL4DR) di Brisbane, Australia pada 20 September 2022, Doddy berkesempatan memperkenalkan DIFAGANA dan Difgandes. Di forum ini dia juga mendapat penghargaan sebagai local champion atas inovasi, keberanian, semangat, dan tekadnya yang tanpa henti bekerja dalam program penanggulangan bencana di komunitas.

Doddy Kaliri, Pegiat Disabilitas, DIFAGANA, Inovator Lokal YEU

belum terinformasikan dengan baik. Padahal, kalau terjadi bencana misalnya kebakaran atau gempa, tentu akan berdampak sekali. Apalagi bagi Penyandang Disabilitas," ungkap Misbahul Arifin.

Pemikiran mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran semua pihak terkait dengan sensitivitas Penyandang Disabilitas dalam pengurangan risiko bencana inilah yang melatarbelakangi ULD Kebencanaan melakukan serangkaian sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan pada lembaga tanggap darurat seperti BPBD, Palang Merah Indonesia (PMI), pemadam kebakaran (Damkar), dan Badan SAR Nasional (Basarnas). Selain itu juga pada relawan di komunitas aksi kemanusiaan.

Dampak dari serangkaian sosialisasi ini, kapasitas masyarakat mengenai pengurangan risiko bencana meningkat. Masyarakat mulai paham mengenai sistem rujukan ketika terjadi bencana. selain itu, Penyandang Disabilitas juga mulai paham respons tepat ketika terjadi bencana, dan rujukan ketika ada risiko bencana di tingkat rumah tangga seperti kebocoran gas dan ancaman sarang lebah.

"Pada masa pandemik, upaya yang kita lakukan adalah penyuluhan mengenai pentingnya desinfeksi pada alat bantu Disabilitas. Selain itu kita juga mengorganisir Penyandang Disabilitas untuk ikut dalam program vaksinasi," tambahnya. Namun, karena sampai saat ini kegiatan yang dilakukan oleh ULD Kebencanaan masih bersifat insidental menjadikan capaian kegiatan belum sepenuhnya optimal. Ke depannya, dia berharap ULD Kebencanaan Kota Solo diberi kesempatan untuk mengelola program, sehingga upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan bisa lebih optimal dan berkelanjutan.

Misbahul Arifin, Ketua ULD Bencana Kota Surakarta.

Memberdayakan Orang Lanjut Usia dalam Sistem Pertanian Modern



Foto: Modul kendali irigasi kabut cerdas Ngudi Mulya_Dok. YEU/Lorenzo

Smart Irigasi Kabut merupakan sebuah sistem irigasi cerdas dengan memanfaatkan teknologi dan penggunaan ponsel cerdas (smartphone) yang digagas oleh Kelompok Tani Ngudi Mulya dari Kabupaten Gunungkidul. Dengan dukungan dari YAKKUM Emergency Unit (YEU), kelompok tani ini mengembangkan sistem irigasi berbasis digital, yang memudahkan petani yang sebagian besar orang lanjut usia untuk bertani.

Sarjito, salah satu inovator lokal kelompok tani, menyatakan bahwa petani lanjut usia menjadi dasar pengembangan sistem ini, sekaligus menjadikan tantangan lebih lanjut.

Dengan minimnya ketersediaan air, irigasi menjadi salah satu tantangan dalam melakukan usaha pertanian. Sistem irigasi yang umumnya dilakukan oleh petani tradisional masih memerlukan tenaga dan biaya yang banyak. Padahal, para petani tradisional ini kebanyakan sudah berusia lanjut karena fenomena urbanisasi. Pemudanya cenderung memilih bekerja di sektor industri di perkotaan. Namun saat ini, fenomena ini sudah berkurang. Banyak pemuda setempat yang lebih memilih tinggal dan bekerja di sekitar rumah ketimbang merantau ke kota.

"Awal pengembangan sistem irigasi ini, ya, dari petani yang kebanyakan berusia lanjut. Sehingga dengan pemanfaatan teknologi ini, irigasi menjadi lebih mudah dilakukan, dan irit biaya. Tantangannya adalah petani lanjut usia tidak terbiasa menggunakan smartphone," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, di fase awal program inovasi bersama dengan YEU, sistem irigasi yang dilaksanakan masih manual. Petani perlu membuka keran-keran air untuk mengairi sawah. Dan dalam fase scale up ini, proyek dikembangkan dengan menambahkan teknologi pertanian berbasis internet dan dapat dioperasikan menggunakan smartphone.

Tantangan mendekatkan teknologi ke petani lanjut usia dapat diselesaikan dengan baik oleh Tim Inovator Lokal Ngudi Mulya. Sarjito menjelaskan, setidaknya ada tiga pendekatan yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi petani lanjut usia dalam pelaksanaan program. Ketiga pendekatan itu adalah:



pertama, mengoptimalkan peran keluarga sebagai lingkungan terkecil petani lanjut usia dalam menggunakan smartphone;



kedua, mendekatkan proses transfer pengetahuan kepada petani lanjut usia. Pendekatan ini dilakukan dengan diskusi dan melaksanakan proses

pembelajaran di sawah. Dari pengalaman kelompok tani, di ruang-ruang pembelajaran yang formal, para petani cenderung mengikuti dengan diam dan pasif. Sementara ketika di sawah, diskusi bisa dilakukan dengan lebih aktif dan petani lanjut usia lebih banyak menelurkan ide juga memberikan pertanyaan;

03

ketiga, mengelola diskusi kelompok tani secara rutin, sehingga proses pendampingan sekaligus monitoring dan evaluasi bisa dilakukan secara intensif.

Hasilnya, saat ini kualitas pertanian anggota kelompok tani meningkat. Petani bisa bertanam di sepanjang tahun, sangat berbeda dengan kondisi sebelum pemberlakuan sistem irigasi terpadu di mana petani tidak bisa bertanam di musim kemarau. Sekarang, di musim hujan smart irigasi kabut tidak digunakan dan petani bisa bertanam padi, sementara di musim tanam kedua, penggunaan sistem irigasi ini digunakan untuk bertanam sejumlah tanaman lain seperti cabai, bawang merah, tembakau, sayuran, dan jagung. Selain itu, dengan sistem irigasi terpadu, pembiayaan untuk pengairan bisa diminimalkan.

Berbicara mengenai harapan pengembangan program yang sudah dilakukan, Sarjito menyatakan keinginannya untuk memiliki sumber pengairan mandiri. Dia menyebutkan bahwa saat ini di daerahnya sudah dibangun tiga sumur dalam yang pembangunannya dibiayai oleh pemerintah, namun penggunaannya masih terfokus pada kebutuhan rumah tangga. Harapannya, ada yang memfasilitasi pembuatan sumur yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan irigasi.

Sarjito, Pegiat Kelompok Tani Ngudi Mulya, Tim Inovator Lokal YEU



Mengoptimalkan Peran Kader Perempuan dalam Pendataan Disabilitas di Desa



Foto: CIQAL menginisiasi KDD dan menggerakkan kader perempuan di desa_Dok. YEU/Lorenzo

Arni Suwarni, seorang pegiat Disabilitas yang tergabung dalam Yayasan CIQAL (Center for Improving Qualified Activity in Life of People with Disabilities), memiliki angan-angan untuk membuat sistem rehabilitasi berbasis masyarakat bagi Disabilitas berat. Sistem ini dilaksanakan untuk memungkinkan perawatan Disabilitas berat yang butuh pendampingan, dan keluarganya sudah tidak ada, bisa dirawat di rumahnya. Kader perempuan di desa menjadi ujung tombak sistem ini, sementara mekanisme pendanaan masih belum mendukung. Dia menyebutkan bahwa angan-angan ini berangkat dari pengalaman melakukan pendataan Disabilitas di empat desa di Argodadi, Kepuharjo, Panggunharjo, dan Wukirsari, di mana kader perempuan desa memiliki semangat tinggi dan dedikasi besar dalam melakukan kegiatan sosial berbasis masyarakat.

CIQAL merupakan salah satu inovator lokal YAKKUM Emergency Unit (YEU) yang mendapatkan dukungan pendanaan IDEAKSI untuk mengembangkan sistem informasi desa yang inklusif dan terintegrasi dengan sistem informasi desa yang telah ada. Proyek ini dilakukan salah satunya dengan memastikan pembuatan data terpilah untuk memastikan Penyandang Disabilitas tidak tertinggal dalam program pengelolaan bencana maupun program pembangunan lain yang dilaksanakan di desa.

"Dalam proses pendataan yang banyak berperan adalah kader PKK desa, dengan arahan dari pemerintah desa seperti Pak Jogoboyo atau Kamituo. Dedikasi yang baik dari kader PKK dan komitmen Pemerintah Desa menjadikan proses pendataan yang dilakukan berjalan dengan baik. Hasilnya, dengan adanya data Disabilitas, kinerja pemerintah desa menjadi lebih baik. Selain itu juga perhatian bagi Penyandang Disabilitas meningkat," jelasnya.

Lebih lanjut dia menyatakan bahwa instrumen yang digunakan dalam pendataan sudah mengadopsi *Washington Group Short Set of Questions* (WGQ) dengan dikombinasikan dengan pertanyaan lain. Meskipun instrumen ini cukup detail, pelaksanaan pendataan berjalan lancar dengan arahan dari pemerintah desa, sekaligus pendampingan dari CIQAL.

Melalui program ini, ada banyak perubahan yang sudah dihasilkan. Dulunya warga di lereng Gunung Merapi belum memiliki kesadaran terhadap Penyandang Disabilitas. Dia mencatat setidaknya ada lima hal penting yang menjadi dampak dari intervensi program yaitu:



pertama, ketersediaan data terpilah Penyandang Disabilitas di desa;



kedua, ada komitmen pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran bagi Penyandang Disabilitas

dan menyediakan sarana aksesibilitas di kantor desa;

03

ketiga, adanya sistem informasi desa yang inklusif yang saat ini baru terbentuk di Kepuharjo. Sistem informasi ini memungkinkan adanya update dan verifikasi data;

04

keempat, Kelompok Disabilitas Desa (KDD) sudah terbentuk melalui SK Kepala Desa; dan

05

kelima, meningkatnya kesadaran Tim Tagana dan pemerintah desa. Sebelum intervensi program, keberadaan Penyandang Disabilitas menjadi tanggung jawab keluarganya masing-masing, namun saat ini sudah dirasa menjadi tanggung jawab bersama.

Meskipun sederet kemajuan sudah dicapai, kerja CIQAL bersama-sama dengan desa tidak berhenti begitu saja. Arni menyebutkan masih memiliki sejumlah harapan ke depan, di antaranya adalah:

01

Meningkatkan pelatihan mengenai kebencanaan.

02

Penguatan Penyandang Disabilitas dan KDD di desa. Ini dikarenakan dalam intervensi program, jumlah kader Disabilitas yang aktif di desa masih minim, hal ini dirasa menjadi tugas bersama untuk meningkatkan partisipasi mereka.

03

Menuangkan komitmen desa melalui Perdes yang saat ini sedang disusun.

Arni Suwarni, Staff Program CIQAL, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FEB UMY), Inovator YEU

Tanggap Darurat Banjir yang Sensitif terhadap Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan

Sungai Gajah Wong merupakan salah satu sungai di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang kerap kali dilanda banjir. Ini terjadi karena debit yang melebihi kapasitas sungai yang menyempit akibat banyak bangunan di bantaran sungai. Hal ini menyebabkan sungai meluap ketika terjadi hujan deras dan kurun waktu panjang. Meskipun karakteristik banjir yang terjadi di sungai ini berlangsung sebentar, dampaknya cukup menjadi kewaspadaan warga.



Foto: Simulasi evakuasi untuk kelompok berisiko oleh komunitas peduli sungai_Dok. PB Palma

Penanggulangan Bencana dan Pelayanan Masyarakat (PB Palma) merupakan bagian dari Gereja Kristen Jawa (GKJ) Ambarrukma yang fokus pada pengurangan risiko bencana (PRB) dan berkontribusi terhadap kesiapsiagaan masyarakat di wilayah sekitar gereja sebagai wujud pelayanan terhadap masyarakat. Yonathan Denny Subrata, seorang pegiat di PB

Palma menyebutkan GKJ Ambarrukma telah lama membangun interaksi bersama warga, utamanya dalam mendukung kegiatan gereja terutama ketika ada acara besar. Di sisi lain, gereja juga menyediakan sejumlah fasilitas yang bisa digunakan warga seperti alat bantu Disabilitas.



Foto: Penanda rumah hasil kolaborasi bersama komunitas sungai_Dok. YEU/Lorenzo

PB Palma merupakan salah satu inovator yang mendapatkan dukungan pendanaan dari YAKKUM Emergency Unit (YEU) melalui IDEAKSI dalam melaksanakan program tanggap darurat banjir akibat luapan Sungai Gajah Wong. Pria yang akrab disapa Denny ini menyebutkan program ini berangkat dari asesmen kebutuhan masyarakat di bantaran sungai yang mayoritas memiliki tingkat perekonomian menengah kebawah. Program yang dilaksanakan bersifat efektif dan inklusif, efektif dengan penggunaan early warning system (EWS) karena mampu mendeteksi potensi banjir yang terjadi setiap saat dan berguna

terutama di malam hari. Sedangkan inklusif karena program ini dibuat dengan pendekatan sensitivitas terhadap warga Penyandang Disabilitas dan kelompok rentan.

“Ada tanda khusus yang dipasang di rumah-rumah yang rentan banjir, dan jika ada anggota keluarga dari kelompok rentan seperti Penyandang Disabilitas, anak-anak, orang lanjut usia, perempuan hamil akan dipasang tanda tambahan. Tanda ini memiliki kode yang hanya dipahami oleh warga,” jelasnya.

Program ini awalnya dilaksanakan di dua dukuh di Desa Caturtunggal, yaitu Dukuh Papringan dan Nologaten. Dalam fase scale-up, program diperluas cakupannya ke menjadi lima dukuh dengan tambahan Dukuh Mrican, Nologaten dan Gowok. Ada dua komunitas yang digandeng oleh PB Palma yaitu Komunitas Peduli Gajah Wong dan Komunitas Ambar Siogo. Selain melalui EWS, program ini juga dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas warga setempat terkait penanggulangan banjir dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan dan pembuatan prosedur tetap (protab) ketika terjadi bencana.

Selain itu, PB Palma juga bekerjasama dengan pemerintah desa terkait program penanggulangan bencana yang inklusif. Hal ini dilakukan di antaranya dengan memberikan pelatihan kepada Tim Kelurahan Tangguh (Kaltana). Selama ini, Tim Kaltana sudah dibentuk tetapi kegiatannya masih belum banyak dilakukan. Selain itu, kerjasama juga dilakukan untuk mendorong ketersediaan data terpilah desa. Dalam sistem demografi desa yang sudah ada hanya pemilahan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan saja. PB Palma mulai memperkenalkan sistem Sex, Age, Disability Disaggregated Data (SADDD) melalui presensi setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Yonathan Denny Subrata, Koordinator Tim Inovator PB Palma, Inovator Lokal YEU

Lembar Penilaian Mandiri

Lembar isian berikut dapat Anda gunakan untuk melakukan penilaian mandiri apakah Anda atau organisasi Anda sudah inklusif. Penilaian ini berguna untuk menentukan pendekatan yang sesuai agar Anda atau organisasi Anda berperan lebih baik dalam merancang program atau kegiatan dalam Pengurangan Risiko Bencana yang Inklusif.

Lembar 1: Penilaian individu pelaksana program

Nama :
Organisasi :
Tanggal penilaian :

No	Pertanyaan	Jawaban		
		Ya	Belum sepenuhnya	Tidak
1.	Apakah Anda memiliki kebutuhan khusus? – <i>jika tidak langsung ke pertanyaan 4</i>			
2.	Dalam mengikuti pelatihan atau program apakah Anda bisa menyuarakan pendapat dengan lancar? – <i>jika ya langsung ke pertanyaan 4</i>			
3.	Apakah dalam mengikuti pelatihan atau kegiatan lain Anda butuh pendamping atau perlakuan khusus agar Anda dapat menyuarakan			

	pendapat dengan lancar			
4.	Adakah salah satu pengurus organisasi/kelompok Anda yang Penyandang Disabilitas atau lansia atau perempuan?			
5.	Apakah Anda pernah mendapatkan atau menyelenggarakan pelatihan mengenai sensitivitas Disabilitas?			
6.	Apakah Anda pernah mendapatkan atau menyelenggarakan pelatihan untuk dapat melakukan komunikasi dan interaksi dengan Disabilitas dan Lansia?			
7.	Apakah Anda memastikan akomodasi yang layak menjadi prioritas dalam merencanakan kegiatan atau program			
8.	Apakah Anda memperhatikan keseimbangan peserta dengan ragam Disabilitas, gender dan usia dalam mengundang peserta?			
9.	Apakah Anda memastikan peserta yang berkebutuhan khusus didampingi untuk dapat terlibat dalam kegiatan			

10.	Adakah kesempatan orang berkebutuhan khusus menyatakan pendapatnya dan dibuktikan dalam notula?			
-----	---	--	--	--



Dari sepuluh pertanyaan di atas, semakin banyak jawaban ya menunjukkan bahwa semakin banyak aspek inklusif yang Anda terapkan.

Dalam melakukan penilaian ini, catatan penting yang perlu diperhatikan jika Anda adalah:

- Pelaksana program dari kelompok Disabilitas, orang lanjut usia ataupun kelompok rentan lain

Memiliki latar belakang dari kelompok rentan menjadikan Anda memiliki pemahaman yang baik karena ini menjadi bagian hidup sehari-hari. Meskipun begitu, ada beberapa hambatan yang menghindarkan Anda dalam memahami prinsip inklusi seperti kurang percaya diri dalam mengemukakan pendapat. Hal ini bisa diatasi dengan banyak berlatih dan berinteraksi dengan masyarakat dari latar belakang yang beragam. Menyuarakan pendapat menjadi salah satu kunci Anda untuk bisa menyebarkan inklusivitas, karena Anda memiliki pengalaman hidup yang kaya.

Pelaksana program yang bukan dari kelompok rentan

Melibatkan diri dan bergaul dengan wajar dengan masyarakat yang berasal dari beragam latar belakang menjadi kunci Anda dalam membangun pemahaman inklusi pada diri sendiri. Dan Anda juga perlu menyadari bahwa masing-masing individu hadir dengan membawa banyak identitas sebagai bagian dari interseksionalitasnya, bisa jadi faktor itu juga ada pada diri Anda meskipun Anda bukan berasal dari kelompok rentan. Oleh karena itu, hadir dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan mau belajar dari mereka menjadi langkah yang baik bagaimana Anda membentuk pribadi yang inklusif

Lembar 2: Penilaian program

No	Pertanyaan	Jawaban		
		Ya	Belum sepenuhnya	Tidak
1.	Apakah organisasi Anda menyediakan rencana ketangguhan bagi kelompok dampingan Anda? *rencana ketangguhan merujuk pada penguatan kelompok paling berisiko lebih siap dan tangguh dalam upaya pengurangan risiko bencana			
2.	Apakah dalam menyusun program sudah dibuat Analisa Risiko dan cara-cara mengantisipasinya terkait dengan kebutuhan disabilitas, lansia dan kelompok berisiko lainnya pada situasi darurat?			
3.	Apakah ada keterlibatan langsung sebagai pelaku dalam aktivitas simulasi bencana termasuk disabilitas, lansia, perempuan hamil dan menyusui, anak-anak, remaja?			
4.	Apakah dalam merencanakan kegiatan atau program, Anda			

	berkonsultasi dengan kelompok berisiko yang menjadi subyek program?			
5.	Dalam melaksanakan kegiatan atau program pengurangan risiko bencana, apakah ada upaya khusus untuk memungkinkan kelompok berisiko berpartisipasi secara penuh dan efektif?			
6.	Dalam membuat kegiatan atau program, apakah ada perencanaan akomodasi yang layak, seperti Juru Bahasa Isyarat untuk peserta Tuli, ramp/plengsengan atau jalur landai yang dilengkapi pegangan tangan bagi Penyandang Disabilitas fisik, atau bangunan yang dilengkapi jalur pemandu bagi Penyandang Disabilitas netra?			
7.	Dalam melaksanakan program atau kegiatan, apakah Anda menerapkan pendekatan yang spesifik (misalnya penilaian kebutuhan atau pendekatan lain yang berguna untuk meningkatkan partisipasi) bagi individu dari kelompok berisiko?			

8.	Dalam merancang metode kegiatan atau pelatihan, apakah Anda sudah melakukan upaya untuk memastikan masing-masing peserta mendapatkan informasi dan mampu memberikan respon terhadap informasi tersebut?			
9.	Apakah dalam menyusun alat monitoring dan evaluasi Anda melibatkan dan meminta pendapat disabilitas, lansia, kelompok berisiko lainnya yang menjadi penerima manfaat program?			



Dari kesembilan pertanyaan di atas, semakin banyak jawaban ya mengindikasikan bahwa program pengurangan risiko bencana yang Anda laksanakan semakin inklusif. Pertanyaan-pertanyaan di atas merupakan rangkuman dari penerapan prinsip inklusif dalam program pengurangan risiko

bencana. Anda juga bisa menambahkan lagi beberapa pertanyaan tambahan yang berguna dalam menganalisis program Anda sendiri, pertanyaan tersebut hendaknya didasarkan pada pengalaman yang sudah dilakukan, baik oleh program Anda sendiri ataupun program lain yang memiliki bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.

Lembar 3: Penilaian organisasi

Organisasi :
 Tanggal penilaian :
 Pelaksana penilaian :

No	Pertanyaan	Jawaban		Tidak Lanjut
		Ya	Tidak	
1.	Apakah dokumen organisasi Anda (visi misi, maksud tujuan organisasi, rencana strategis) menyebutkan dan atau memperhatikan gender, usia, dan Disabilitas?			
2.	Apakah ada anggaran khusus untuk membuat, mempersiapkan dan mendukung upaya inklusi dalam organisasi termasuk dalam program-programnya?			
3.	Apakah ada uraian tugas pekerjaan anggota dari organisasi Anda yang menyebutkan perhatian terhadap kelompok rentan? Dan apakah termasuk dalam salah satu poin dalam penilaian kinerja di organisasi anda?			
4.	Apakah dalam proses pelaksanaan program staf/relawan melakukan konsultasi atau diskusi			

	dengan lansia dan disabilitas tentang bagaimana menemukan cara-cara sederhana dan praktis untuk mengatasi hambatan partisipasi, akses ke layanan dan perlindungan?			
5.	Apakah pelaksanaan program telah menggunakan berbagai metode komunikasi, media dan saluran informasi yang memungkinkan orang lanjut usia dan Disabilitas dapat mengakses dan menanggapi semua informasi penting?			
6.	Apakah ada pembekalan bagi staf/anggota organisasi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas dan orang lanjut usia, serta pentingnya melibatkan mereka dalam respon kemanusiaan (termasuk di dalamnya upaya pengurangan risiko bencana, baik itu bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dll; maupun bencana non alam seperti pandemi Covid-19)?			
7.	Apakah pengelolaan data yang digunakan oleh staf program/lapangan sudah terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia dan jenis disabilitas?			

8.	Apakah pelaksana monitoring dan evaluasi program sudah mendapat pembekalan mengenai gender, usia dan disabilitas?			
----	---	--	--	--



Dari delapan pertanyaan di atas, semakin banyak Anda mencentang jawaban ya, menunjukkan organisasi tempat Anda bernaung semakin inklusif. Kolom terakhir menjadi acuan bagi Anda dan organisasi dalam melakukan tindak lanjut, guna memantapkan diri menerapkan prinsip-prinsip inklusif pada organisasi yang fokus dalam isu-isu kemanusiaan.

Evaluasi dari Pengguna

Penyusun modul ini menyadari benar bahwa cara, materi dan alat-alat peraga yang digunakan oleh para Pendamping Masyarakat dalam mewujudkan program penanggulangan bencana yang inklusif sangatlah beragam. Penting untuk memandu dan memulai pendekatan inklusi yang memudahkan pendamping masyarakat dan aktor kemanusiaan dapat:

- 01 Memahami pengetahuan mengenai Penyandang Disabilitas sebagai bagian keberagaman manusia
- 02 Memicu keingintahuannya untuk menanyakan hal-hal penting bagi masyarakat, pemerintahan di tingkat desa maupun di tingkat atasnya
- 03 Merasa bebas dan nyaman terlibat untuk berpendapat dan memberikan sumbangsih dalam bentuk apa pun
- 04 Mempunyai rasa memiliki terhadap proses dan hasil kerja mereka

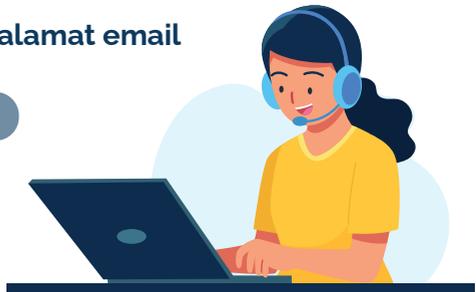
Demikian halnya pendekatan yang ditawarkan dalam modul ini pun disadari masih mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari para pengguna modul ini sangat diharapkan untuk tujuan meningkatkan kemanfaatan dan kemudahan pemakaian buku ini.

Kirimkan masukan Anda ke alamat email

inovasi.ideaksinklusi@gmail.com

ida.puji.astuti@gmail.com

yeu@yeu.or.id



Lembar Tanggapan

Formulir ini hendaknya diisi oleh staf dan mitra YEU, pihak ketiga dan yang memiliki tanggung jawab praktis untuk menjalankan upaya inklusivitas dalam Penanggulangan bencana.

Nama :
Organisasi :
Jenis Organisasi :
Alamat :

No.	Pertanyaan – Lingkirlah jawaban yang sesuai
1.	Apakah isi modul ini sesuai dengan pekerjaan Anda? a. Dapat diterapkan b. Sedikit dapat diterapkan c. Tidak dapat diterapkan
2.	Apakah modul ini mudah dipahami? a. Mudah dipahami b. Tidak terlalu mudah dipahami c. Sulit dipahami
3.	Bagaimana topik yang ada dalam setiap bab? a. Jelas b. Kadang-kadang jelas c. Membingungkan d. Diulang-ulang tanpa ada gunanya
4.	Apakah modul ini sudah sesuai untuk mempelajari terkait inklusi dalam Pengurangan Risiko Bencana? a. Ya b. Tidak

5.	<p>Bagaimana bahasa yang digunakan dalam modul ini?</p> <p>a. Jelas dan sederhana</p> <p>b. Tidak konsisten – bahasa beberapa Bab lebih rumit daripada yang lainnya</p> <p>c. Secara umum terlalu rumit untuk topik-topik yang dimaksudkan oleh modul ini</p>
No.	<p>Silahkan memberi komentar terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut!</p> <p>Gunakan kertas tambahan jika diperlukan.</p>
1.	<p>Jika ada, bidang tema manakah dari modul ini yang perlu diperjelas dan dikembangkan lebih jauh?</p>
2.	<p>Sambil mengingat tujuan penggunaan dan cakupan modul ini sebagaimana dinyatakan dalam bagian pendahuluan, adakah masalah tambahan khusus yang sebaiknya diperhatikan?</p>

3.	Bagian mana dari modul ini yang menurut Anda sangat berguna? Mengapa?
4.	Jika ada, bidang tema manakah dari modul ini yang perlu diperjelas dan dikembangkan lebih jauh?
5.	Berilah contoh tentang bagaimana Anda telah menggunakan modul ini!

6.

Apakah Anda memiliki komentar lainnya yang perlu ditambahkan?



Memastikan barak pengungsian aksesibel bekerja sama dengan Dinas Sosial DIY sebagai bentuk penanggulangan bencana yang inklusif. (Dok. YEU/DIFAGANA DIY)



Funded by



elrha



START
NETWORK



IDEAKSI

ide inovasi aksi inklusi

YAKKUM Emergency Unit

Jalan Kaliurang KM 12, Dusun Candi 3 Nomor 34

Yogyakarta 55581 - Indonesia

Telepon: +62-274-882477 | www.yeu.or.id